

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan satu kesatuan individu yang hidup dalam satu wilayah tertentu yang beragam baik dari jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat juga dikatakan sebagai tiap-tiap individu yang hidup di suatu daerah atau wilayah tertentu yang memiliki perbedaan usia, baik mulai dari bayi atau balita, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga manula atau manusia lanjut usia serta perbedaan dari segi status sosial ekonominya. Setiap masyarakat memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya baik dilihat dari wilayahnya, adat istiadatnya maupun kebutuhannya.

Dalam setiap masyarakat pasti kita semua mengenal dengan adanya pemimpin, seperti ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, dan tokoh masyarakat lainnya. Masyarakat identik dengan adanya interaksi sosial antara masing-masing anggota masyarakat maupun anggota masyarakat dengan pemimpin dalam masyarakat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat tentu perlu adanya tokoh masyarakat atau agen perubahan sosial sehingga mampu membuat masyarakat menjadi maju dan berkembang. Menurut Soekanto (2007:272), Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan kata lain, tokoh masyarakat dapat juga dikatakan sebagai agen perubahan sosial yang telah memiliki pengalaman dan memiliki kepercayaan oleh setiap anggota masyarakat.

Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam hidup dan kehidupan baik individu maupun kelompok. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap masyarakat terdiri atas individu yang memiliki perbedaan karakteristik dan

kebutuhan dari masing-masing individu, akan tetapi adapula kebutuhan yang dirasakan oleh bersama masyarakat. Kebutuhan yang dirasakan bersama terjadi manakala ada permasalahan yang timbul dan dirasakan bersama oleh setiap individu dalam masyarakat. Permasalahan dapat mengacu ke dalam berbagai aspek, seperti permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial, agama dan sebagainya sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Semakin berkembangnya kehidupan, maka kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks. Semakin berkembangnya IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) dalam kehidupan masyarakat, maka semakin tinggi pula permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui permasalahan itulah, mereka butuh untuk menyelesaikan dan mencari solusinya secara bersama-sama, sehingga dengan mudah mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul dan dirasakan bersama. Kebutuhan yang timbul karena adanya permasalahan yang dialami bersama disebut sebagai kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dan secara bersama-sama dalam membelajarkan peserta didik sehingga mereka (peserta didik) memiliki potensi akademik maupun non akademik dalam kehidupannya. Pendidikan seyogianya merangkul semua lapisan masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya tidak perlu dilakukan didalam kelas, akan tetapi makna dari pendidikan itu sendiri ialah menyampaikan informasi yang bersifat mendidik (interaksi edukatif) dari seseorang kepada seseorang demi terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dan dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Makna arti pendidikan diatas merupakan makna dari pendidikan luar sekolah. Berdasarkan UU SISDIKNAS pendidikan non formal no. 20 Tahun 2003, yakni :

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik” (pasal 26 ayat 3)

Pendidikan luar sekolah memberikan layanan yang bersifat mendidik, membangun, dan memberdayakan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang timbul dan dirasakan oleh individu atau kelompok. Hal ini

Lupy Dwi Septa Satria, 2014

Pemimpin Pelopor Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sesuai dengan pernyataan Kamil dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Non Formal” (2009:48) yang menyatakan bahwa :

Masyarakat sebagai sasaran pendidikan non formal terdiri dari dua yaitu masyarakat sebagai sumberdaya pembelajaran dan masyarakat sebagai sasaran pembelajaran. Sebagai sumberdaya pembelajaran, peran masyarakat dapat dilihat dari daya dukung terhadap implementasi dan pengelolaan program, serta pengembangan program di masa depan. Sedangkan peran masyarakat sebagai sasaran, dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan, keterampilan dan kualitas diri.

Dalam memberikan pelayanan pendidikannya, tenaga pendidikan luar sekolah harus menganalisis kebutuhan yang diinginkan oleh setiap individu atau kelompok. Berdasarkan hal diatas maka para penyusun kebijakan membuat program yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, karena pada hakikatnya program-program yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau permasalahan yang ada merupakan program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya ditujukan pada sekelompok orang, namun mencakup semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berangkat atas ketidakadilan dari faktor kekuasaan dan kebijakan (regulasi). Fahrudin (2005:19) menyatakan bahwa :

Model pemberdayaan mencakup tiga hal yakni strategi atau pendekatan Mikro (individu) melalui bimbingan konseling, strategi atau pendekatan Mezzo (kelompok atau *Peer Group*) melalui pendidikan pelatihan dan dinamika kelompok, serta strategi atau pendekatan Makro (komunitas dan masyarakat) melalui Pengorganisasian masyarakat, aksi sosial, kebijakan sosial dan sebagainya.

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk atau cara (strategi) pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Deliveri (2004a) mengenai proses pemberdayaan, bahwa proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin, Subejo dkk (2005: 01, 01).

Lupy Dwi Septa Satria, 2014

Pemimpin Pelopor Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada hakikatnya pemberdayaan memiliki dua definisi, yaitu pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian fasilitas atau bantuan, sehingga masyarakat menjadi berdaya seperti yang dilakukan oleh pemerintah, maupun pemberdayaan yang dilakukan melalui proses yang bertahap untuk mendorong dan memotivasi tiap individu atau kelompok sehingga mereka memiliki minat dan kemauan dalam belajar dan bekerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Priyono dan Pranakan (Fahrudin, Adi, 2005:48), bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat dan dalam masyarakat itu sendiri yang terdiri atas masing-masing individu yang memiliki kebutuhan yang sama dan permasalahan yang sama sehingga diharapkan mampu membangun masyarakat atau memajukan masyarakat itu sendiri dengan kata lain memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Mengutip dari pernyataan diatas, pemberdayaan masyarakat erat hubungannya dengan pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat merupakan satu upaya aksi sosial yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses membangun masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, konteks pembangunan masyarakat lebih luas, artinya subjek pemberdayaannya bukanlah individu melainkan segenap masyarakat ikut andil dalam proses pemberdayaan. Seperti apa yang telah dikutip dalam blog Pengembangan Masyarakat Islam (Anshori, 2009:01), mengatakan bahwa :

Community Development, memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Merujuk atas pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat tidak lepas dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat sangatlah mempengaruhi keberlangsungan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di suatu masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam membangun masyarakat. Pembangunan masyarakat erat hubungannya dengan partisipasi masyarakat maupun pembangunan yang bersifat partisipatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang mengatakan bahwa :

Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat (Pasal 1 ayat 10).

Berdasarkan peraturan menteri, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan dan membangun masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dalam pembangunan masyarakat yang dilakukannya secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kamil (2009:56) yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota (warga belajar) dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat.

Partisipasi masyarakat merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengikutsertakan setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merujuk pada berbagai aspek, seperti partisipasi masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, maupun lingkungan dan sebagainya. Apapun itu, pasrtisipasi masyarakat mampu mengembangkan masyarakat ke arah

Lupy Dwi Septa Satria, 2014

Pemimpin Pelopor Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang lebih positif dan mampu memandirikan masyarakat sehingga masyarakat mampu menciptakan dan memecahkan masalah yang dihadapinya di dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. Merujuk pada pernyataan peraturan tersebut memberikan arti bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan langsung yang bersifat aktif oleh masyarakat itu sendiri selama proses pengelolaan program (manajemen program) dalam hal ini manajemen program pendidikan luar sekolah, dari masyarakat dan hasil yang didapatkan atau diperoleh tersebut sudah tentu untuk masyarakat dan dilakukan di dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat merujuk pada implementasi kegiatan pemberdayaan yang dicanangkan guna memajukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sedangkan indikator atau indikasi dari kesejahteraan sangatlah luas, seperti sosial, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya sesuai dengan apa yang ingin dicapai diawal kegiatan pemberdayaan berlangsung. Menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya yang berjudul “Membangun Desa Partisipatif” (2006:34), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Oleh karenanya, konsep DUOM (Dari, Untuk, Oleh Masyarakat) dalam pemberdayaan, serta implementasi manajemen pendidikan luar sekolah berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai objek formal dari kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau program yang berhubungan erat dengan partisipasi antar anggota maka perlu sosok pemimpin yang mampu mengarahkan dan menjadi contoh sehingga semua anggota terangkul dan kegiatan berjalan baik dan lancar yang kemudian manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara bersama-sama. Melalui pernyataan tersebut partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan kepemimpinan seseorang pemimpin sebagai subjek

yang memberikan pengaruh kepada anggotanya. Kepemimpinan dapat dilakukan dalam sebuah kelompok dapat pula dilakukan pada suatu masyarakat tertentu di suatu daerah. Kepemimpinan kelompok merupakan salah satu indikator dari partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak akan berhasil apabila tidak ada stimulus yang diberikan oleh seorang pemimpin yang baik dan arif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Drs. Nunu, dkk. dalam *handout*-nya yang berjudul *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan* (2004:13) yang menyatakan bahwa pembinaan kelompok akan berhasil apabila semua anggota berpartisipasi. Berbicara mengenai kepemimpinan maka berbicara mengenai upaya dan gaya seorang pemimpin dalam memberikan pengaruhnya kepada anggotanya sehingga dapat ditiru dan dilakukan demi kelangsungan hidup bersama. Makna kepemimpinan menurut Copeland (1942), seperti yang dikupas dalam *handout* Drs. Nunu yang berjudul *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan* (2004:53), kepemimpinan adalah seni berhubungan dengan orang lain, merupakan seni mempengaruhi orang melalui persuasi dan contoh konkrit. Partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan seperti kasus pengelolaan bank sampah yang terjadi di RW. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung. Teori kepemimpinan merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dan diintegrasikan dengan teori-teori lainnya yang salah satunya adalah teori lingkungan. Menurut Mumford dalam *handout* Drs. Nunu yang berjudul *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan* (2004:54), bahwa kepemimpinan muncul oleh kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan dia memecahkan masalah sosial dalam keadaan tertekan perubahan dan adaptasi.

Upaya anggota masyarakat dalam mendayagunakan lingkungannya seperti memanfaatkan sampah sebagai sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat di manfaatkan. Pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis misalnya dapat dijadikan kompos dan pakan ternak maupun kerajinan tangan. Adapun prinsip utama yang digunakan dalam mengelola sampah adalah mencegah timbulnya sampah, menggunakan ulang sampah serta mendaur ulang. Jika prinsip ini dijalankan dengan benar dan konsisten, maka akan mendatangkan hasil akhir yang nyata. Pengelolaan sampah yang benar pada akhirnya akan mengurangi polutan,

mendatangkan manfaat ekonomi dan menjadikan lingkungan bersih. Jika lingkungan bersih otomatis kesehatan masyarakat juga terjaga.

Namun merubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah seperti prinsip diatas tidaklah mudah. Masyarakat kita secara kultural sudah terbiasa membuang sampah langsung ke tempat pembuangan sampah. Bahkan banyak ditemui, kebiasaan masyarakat kita yang seenaknya membuang sampah tidak pada tempatnya. Beberapa masyarakat yang sadar lingkungan biasanya telah memilah jenis sampah. Sampah basah dipisahkan dari sampah kering. Tetapi oleh petugas pengangkut sampah, biasanya malah mencampur kembali sampah yang telah dipilah tersebut. Hal ini terjadi, karena kebanyakan gerobak pengangkut sampah tidak memiliki fasilitas pemisah sampah tersebut. Adapula warga masyarakat yang mengumpulkan sampah kering untuk dijual, tetapi kegiatan ini belum maksimal karena masih dilakukan secara individu dan tidak terkoordinir secara terpadu.

Kondisi ini juga diperparah oleh belum adanya lembaga yang menangani pengelolaan sampah dari hulu ke hilir atau secara keseluruhan/komprehensif yang berkesinambungan dan yang mempunyai nilai tambah pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Bila kurangnya lembaga yang menangani pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kebersihan lingkungan, serta masih adanya sikap acuh oleh setiap tokoh masyarakat, tidak adanya jiwa memimpin masyarakatnya sendiri untuk membuat masyarakatnya peduli terhadap lingkungan niscaya lingkungan yang padat penduduk terasa menjadi kumuh bila masalah lingkungan tidak segera teratasi, bukan hanya itu, akibat masalah lingkungan seperti sampah yang tersebar di jalan-jalan bahkan kurangnya penghijauan, dapat mengganggu dan menghambat aliran air dan kurangnya daerah resapan air, sehingga mampu memicu timbulnya bencana banjir pada musim penghujan, dan mungkin dapat diperparah oleh tumbuhnya sarang penyakit yang mampu menjadi wadah penyakit bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah merupakan salah satu upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung. Dinamakan bank sampah, karena sistemnya

seperti menabung di bank. Pada bank sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis nomor rekening dan buku tabungan. Pada buku tabungan mereka tertera nilai Rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan memang bisa ditarik dalam bentuk uang. Jadi tidak menabung sampah lalu menarik sampah. Bank sampah nantinya akan bekerjasama dengan pihak yang memerlukan sampah tersebut. Misalnya para pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain. Demikian pula kerjasama dilakukan dengan pengolah pupuk organik untuk menyalurkan sampah organik yang sudah ditabung. Pengelolaan program bank sampah ini dilakukan pada tahun 2009 lalu dan berdiri pada tahun 2011 hingga saat ini.

Pada umumnya, masyarakat di wilayah perkotaan yang padat penduduk masih membuang sampah sembarangan. Masyarakat tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung. Mereka mampu secara rutin memisahkan sampah yang organik dan non organik, maupun sampah yang berpotensi untuk dibuat menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual, sampah yang mampu di jual di bank sampah, serta kebersihan lingkungan seperti pembuatan biopori, dan klenceng sampah di masing-masing rumah mereka. Tentu hal tersebut tidak terlepas dengan adanya seorang pemimpin yang mampu memimpin mereka. Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila adanya daya dukung dari partisipasi masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya. Seorang pemimpin bukan hanya seorang tokoh masyarakat akan tetapi bisa seorang tokoh masyarakat atau dapat pula seorang yang memiliki pengaruh tinggi atau keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Lingkungan di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung terlihat sangat bersih dan rapih, walau lingkungan padat penduduk tersebut berada di tengah kota dan tidak jauh dengan pusat perbelanjaan maupun persekolahan. Pada mula berdirinya bank sampah yang terdapat di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung, masyarakat di RW itu melakukan kegiatan rutin selama 2 (dua) kali dalam seminggu yakni setiap hari selasa dan jumat, akan tetapi saat ini masyarakat di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung lebih memfokuskan

dalam menabung sampah pada hari selasa di pos yang telah ada di tempat tersebut. Bila setiap daerah mampu membangun masyarakatnya untuk cinta akan lingkungan baik seorang pemimpin yang mampu memimpin masyarakatnya maupun masyarakat yang dengan sadar ikut berpartisipasi dalam memelihara kebersihan lingkungan mampu memberikan dampak yang positif baik bagi masyarakat maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Pemimpin dalam hal ini merupakan pihak yang mampu mengajak anggota masyarakat untuk andil dan ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan melalui pemanfaatan sampah sehingga dampak yang dihasilkan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat itu sendiri maupun lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mencoba meneliti bagaimana pemimpin pelopor mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Rw. 14 kelurahan tamansari kecamatan bandung wetan kota bandung.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

1. Masyarakat Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung ini telah mengetahui jenis-jenis sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan sampah yang harus dikelola ke bank sampah, mereka juga secara terjadwal dan secara sadar mengikuti kegiatan bank sampah yang secara rutin seminggu sekali;
2. Program bank sampah yang dilakukan terhitung dari tahun 2009 dan berdiri pada tahun 2011 hingga saat ini, serta kegiatan bank sampah telah rutin pada hari dan waktu yang telah ditentukan;
3. Kegiatan menabung sampah dalam program bank sampah dilakukan pada setiap hari selasa, sedangkan kegiatan menjual sampah ke pengepul sampah dilakukan pada hari jumat; dan
4. Adanya seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat di Rw. 14 yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang

lingkungan pada umumnya, dan mengenai sampah pada khususnya yang mampu menggerakkan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi dan uraian yang dipaparkan peneliti diatas maka rumusan masalah yang akan ditentukan ialah “Apakah benar pemimpin pelopor mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ?”

Dalam memperjelas ruang lingkup penelitian, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, meliputi :

1. Bagaimana gambaran/profil pemimpin pelopor dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan pemimpin pelopor dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil penyelenggaraan program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?
4. Bagaimana *social benefit* dari program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran mengenai gambaran/profil pemimpin pelopor dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kota Bandung
2. Memperoleh gambaran mengenai strategi yang dilakukan pemimpin pelopor dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung
3. Memperoleh gambaran mengenai hasil penyelenggaraan program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

4. Memperoleh gambaran mengenai *social benefit* yang dihasilkan dalam program bank sampah di Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam hal ini, meliputi :

1. Manfaat/Signifikansi dari Segi Teori

Melalui penelitian ini, mampu memperkuat teori dan/atau konsep baik kepemimpinan dan/atau partisipasi masyarakat bagi peneliti dan praktikan pendidikan luar sekolah terutama dalam hal memberdayakan dan membangun masyarakat

2. Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kebijakan bahwa partisipasi dan kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh dalam pemeliharaan lingkungan, sehingga terciptanya lingkungan yang bukan sekedar bersih akan tetapi sehat dan indah, dan apabila tidak diperhatikan maka akan berdampak merugikan masyarakat itu sendiri

3. Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktik

Melalui penelitian ini, diharapkan para praktik pendidikan terutama pendidikan luar sekolah mampu memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu membangun keikutsertaan masyarakat dalam hal pendidikan maupun pemberdayaan.

4. Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menggerakkan hati masyarakat untuk peduli lingkungan serta menggugah para organisasi masyarakat untuk dapat melakukan aksi positif yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan, seperti penghijauan lingkungan, satu sampah satu orang membuang di tempat sampah, dan sebagainya

E. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam mempermudah penyusunan penulisan dan memperjelaskan bagian-bagian atau sub-sub bab yang akan dibahas, maka penulis menyebutkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Organisasi Skripsi.

BAB II Kajian Teoritis Menjelaskan mengenai Konsep Kepemimpinan, Konsep Partisipasi Masyarakat, Konsep Pembangunan Masyarakat dan Konsep Bank Sampah.

BAB III Metode Penelitian terdiri atas Lokasi dan Subjek Populasi Penelitian, Desain Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Alasan Rasionalnya dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Menjelaskan mengenai Kondisi Objektif Masyarakat Rw. 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Identitas Informan, Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, dan Saran atau Rekomendasi kepada para pemimpin pelopor, masyarakat di rw. 14 yang bersangkutan dan peneliti selanjutnya.